

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Akuntansi saat ini berkembang dengan pesat membuat pelaporan akuntansi lebih banyak digunakan sebagai alat pertanggung jawaban kepada pemilik modal sehingga orientasi perusahaan lebih berfokus kepada para pemilik modal. Di sisi lain, jika ditinjau dari segi ekonomi tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Tetapi seringkali perusahaan mengabaikan dampak sosial dan lingkungan yang terjadi atas tindakan ekonomi yang dilakukan. Tindakan tersebut dapat menimbulkan kerusakan lingkungan contohnya penggundulan hutan, polusi udara, pencemaran air dan lain-lain. Fokus terhadap pemilik modal dan upaya pencapaian tujuan perusahaan mengeksploitasi sumber daya alam dapat mengganggu kehidupan manusia (Setyowati, 2015).

Laporan keuangan sebagai alat yang digunakan manajemen untuk mempertanggung jawabkan kinerja ekonomi perusahaan kepada para investor, kreditur, dan pemerintah. Pengungkapan laporan keuangan dapat dikelompokkan menjadi dua. Adapun pengelompokan pengungkapan laporan keuangan adalah pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku dan ditetapkan oleh badan regulator

atau lembaga yang berwenang. Di Indonesia diatur dalam Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-38/PM/1996 Tanggal 17 Januari 1996 tentang *mandatory disclosure* dalam laporan tahunan bagi perusahaan yang *go public* dalam pasar modal Indonesia. Lembaga yang menjadi otoritas pengungkapan wajib adalah Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal). Laporan tahunan wajib memuat ikhtisar data keuangan penting, laporan dewan komisaris, laporan dewan direksi, profit perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen, tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi atas laporan keuangan, dan laporan keuangan yang telah diaudit.

Pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*) merupakan pengungkapan informasi yang melebihi dari yang telah diwajibkan oleh lembaga yang berwenang. Dalam hal ini, perusahaan akan mengungkapkan informasinya secara sukarela. Pada umumnya pengungkapan sukarela merupakan salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh manajer perusahaan untuk menarik perhatian para investor sehubungan dengan keputusan investasi perusahaan. Dimana manajer akan mengungkapkan informasi yang menurut pertimbangannya adalah *good news* dan sangat diminati oleh investor (Munawir, 2012). Agar dapat berkesinambungan, perusahaan sangat perlu mempertimbangkan lingkungan sosialnya dalam setiap keputusan yang diambil. Salah satu media yang dapat digunakan untuk mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan perusahaan adalah melalui laporan tahunan. Tujuan laporan keuangan tersebut menuntut fungsi pelaporan tidak hanya mengamankan aset perusahaan tetapi juga

mengamankan kesejahteraan sosial. Selain itu juga untuk kepentingan pengambilan keputusan, laporan keuangan juga harus dapat dijadikan alat untuk menilai pertanggung jawaban manajemen dalam mengelola sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah respon sosial atau tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, misalnya menjaga lingkungan sekitar perusahaan, membangun fasilitas umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar, memberikan bantuan beasiswa kepada anak yang dirasa kurang mampu serta berprestasi, dan memberikan bantuan dana untuk kesejahteraan masyarakat sekitar (Darwin, 2004).

Tanggung jawab sosial perusahaan sering dianggap inti dari etika bisnis yang merupakan mekanisme bagi suatu perusahaan yang secara sukarela memberikan perhatian lebih terhadap lingkungan dan sosial dalam menjalankan aktifitas bisnisnya. Di dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, perusahaan tidak hanya mempunyai kewajiban-kewajiban ekonomi dan legal tetapi juga memiliki kewajiban-kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan. CSR merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholder*, termasuk didalamnya adalah pelanggan, pegawai, komunitas, investor, pemerintah, *supplier* bahkan kompetitor.

Saat ini program CSR tengah menjadi *trend* di Indonesia, karena melalui ini perusahaan dapat menumbuhkan reputasinya, seperti meningkatkan citra perusahaan dan investornya, posisi perusahaan, dan bidang usaha perusahaan. Alasan tersebut mendorong perusahaan untuk berlomba-lomba meluncurkan berbagai program-program CSR yang menarik.

Menurut Gray et al. (dalam Sembiring, 2005), tumbuhnya peran perusahaan di tengah masyarakat melahirkan kritik dan kekhawatiran karena menciptakan masalah sosial, polusi, sumber daya, limbah, mutu produk, tingkat safety produk, serta hak dan status tenaga kerja, sehingga sebagian perusahaan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia banyak yang sudah menerapkan CSR, karena mereka dituntut untuk bertanggung jawab, yaitu tidak hanya memaksimalkan laba perusahaan tetapi juga berkontribusi positif terhadap lingkungan sosial tempat mereka berdiri.

Saat ini CSR dilakukan perusahaan karena dapat digunakan untuk menyeimbangkan produk dan *image* perusahaan atau bisa digunakan sebagai strategi bisnis perusahaan. Selain itu, perusahaan juga bisa menggunakan CSR sebagai motivasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pencapaian usaha perbaikan lingkungan di sekitar perusahaan. CSR adalah basis teori tentang perlunya sebuah perusahaan membangun hubungan yang harmonis dengan masyarakat dan lingkungan tempat beroperasi. CSR adalah bentuk tanggung jawab yang dilakukan perusahaan didalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan-

kerusakan lingkungan yang terjadi sebagai akibat dari aktifitas operasional yang dilakukan perusahaan, terutama masyarakat di sekitar wilayah kerja. Parameter keberhasilan suatu perusahaan dalam sudut pandang CSR adalah mengedepankan prinsip moral dan etis, yaitu menggapai suatu hasil terbaik tanpa merugikan kelompok masyarakat.

Di Indonesia terdapat beberapa regulasi yang mengatur tentang CSR dimana secara eksplisit terdapat beberapa pasal yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan CSR. Pertama, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 Ayat (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kedua, Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. PP ini merupakan peraturan turunan dari Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan beberapa regulasi di atas perusahaan diwajibkan untuk melakukan CSR.

Standar CSR yang berkembang di Indonesia merujuk pada standar yang diterapkan GRI (*Global Reporting Initiative*). Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan sebagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan *sustainability reporting* ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)).

Saat ini standar GRI versi terbaru, yaitu GRI G4 yang telah banyak digunakan perusahaan di Indonesia. GRI G4 menyediakan kerangka kerja yang relevan secara global untuk mendukung pendekatan yang terstandarisasi dalam pelaporan yang mendorong tingkat transparansi dan konsistensi yang diperlukan untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi berguna dan dapat dipercaya oleh pasar dan masyarakat. Fitur yang ada di GRI G4 menjadikan pedoman ini lebih mudah digunakan baik bagi pelapor yang berpengalaman dan bagi mereka yang baru dalam pelaporan berkelanjutan sektor apapun dan didukung oleh bahan-bahan dan layanan GRI lainnya ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)).

GRI G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda, baik itu laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu atau *online*. Dalam GRI G4 indikator kerja dibagi menjadi tiga komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial. Kategori ekonomi mencakup kinerja ekonomi, keberadaan pasar, dampak ekonomi tidak langsung, dan praktek pengadaan. Kategori lingkungan hidup mencakup bahan, energi air, keanekaragaman hayati, emisi, efluen dan limbah produk dan jasa, kepatuhan, transportasi, asesmen pemasok atas lingkungan, serta mekanisme pengadaan masalah lingkungan. Kategori sosial mencakup hak asasi manusia, praktek ketenagakerjaan dan lingkungan kerja, tanggung jawab produk dan masyarakat. Total indikator yang terdapat dalam GRI mencapai 91 item

([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)). Dalam melakukan penilaian luas pengungkapan CSR, item-item yang akan diberikan skor, mengacu kepada indikator kinerja atau item yang disebut GRI G4 ([www.globalreporting.org](http://www.globalreporting.org)).

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada tingkat penjualan, aset, dan modal. Ada tiga rasio yang dapat digunakan dalam rasio profitabilitas, yaitu rasio *net profit margin*, *return on aset*, dan *return on equity*. Rasio *net profit margin* dapat menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio *net profit margin* yang tinggi menandakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu, atau biaya yang tinggi untuk tingkat penjualan tertentu. Secara umum rasio yang rendah bisa menunjukkan ketidakefisienan manajemen (Aurelia, 2012).

Teori keagenan memprediksi bahwa perusahaan dengan rasio *leverage* yang lebih tinggi akan mengungkapkan lebih banyak informasi, karena biaya keagenan perusahaan dengan struktur modal seperti itu lebih tinggi. Perusahaan dengan rasio *leverage* yang tinggi memiliki kewajiban untuk melakukan ungkapan yang lebih luas daripada perusahaan dengan rasio *leverage* yang rendah. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek. Rasio ini membandingkan kewajiban jangka pendek dengan sumber jangka pendek. Tingkat likuiditas menunjukkan kesehatan suatu perusahaan dan untuk mengukurnya digunakan rasio lancar. Likuiditas merupakan suatu

indikator mengenai kemampuan perusahaan untuk membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia (Wijaya, 2012).

Kepemilikan manajemen mempunyai andil untuk memajemen perusahaan, menurut teori agensi menyatakan bahwa hubungan keagenan muncul ketika *principal* (orang yang memiliki modal) membayar manajer profesional untuk bertindak atas namanya dan mendelegasikan kekuasaan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan perusahaan atau karyawan. Menurut teori ini, agen secara alami memiliki kepentingan sendiri. Maka, kepemilikan manajemen ini akan meminimalisir kasus keagenan, sebab manajer tersebut juga sekaligus pemegang saham, sehingga manajer tidak akan bekerja untuk kepentingan manajer saja tetapi juga akan lebih memperhatikan kepentingan pemegang saham sebab mereka juga merupakan pemegang saham. Direksi, manajer, dan dewan komisaris yang sekaligus pemegang saham tersebut akan meningkatkan nilai perusahaan dengan lebih memperhatikan pengungkapan CSR, karena dengan meningkatnya pengungkapan CSR minat investor untuk menanamkan sahamnya juga akan meningkat, sehingga nilai perusahaan tentu akan meningkat pula yang mengakibatkan nilai kekayaannya sebagai pemegang saham juga akan meningkat (Setyarini dan Paramitha, 2011).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Setyowati (2015). Perbedaan yang pertama yaitu tahun pengamatan. Tahun pengamatan penelitian terdahulu yaitu 2011-2013, sedangkan

penelitian ini yaitu tahun 2015-2017. Perbedaan kedua adalah sampel perusahaan yang diteliti. Penelitian terdahulu menggunakan sampel pada perusahaan manufaktur, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan jasa transportasi yang terdaftar di BEI. Alasannya karena berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2012 tentang Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, semua perusahaan wajib melaporkan CSR, termasuk perusahaan sektor transportasi. Karena yang menimbulkan polusi tidak hanya perusahaan manufaktur, perusahaan jasa transportasi juga menghasilkan polusi yang merugikan masyarakat dan lingkungan sekitar. Alasan kedua semakin berkembangnya jaman membuat kebutuhan perusahaan jasa transportasi juga meningkat dan membuat polusi yang diakibatkan juga bertambah. Oleh karena itu diharapkan dalam penerapan CSR dapat memperbaiki citra perusahaan yang sempat memburuk, melindungi *shareholders* dan *stakeholders*.

Dari latar belakang permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan CSR dalam laporan keuangannya. Dengan demikian judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Earning Per Share, dan Kepemilikan Manajemen Terhadap Corporate Social Responsibility (Studi Pada Perusahaan Jasa Transportasi Tahun 2015 -2017)”** .

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap CSR Pada Perusahaan Jasa Transportasi Tahun 2015-2017 ?
- b. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap CSR Pada Perusahaan Jasa Transportasi Tahun 2015-2017 ?
- c. Bagaimana pengaruh *earning per share* terhadap CSR Pada Perusahaan Jasa Transportasi Tahun 2015-2017 ?
- d. Bagaimana pengaruh kepemilikan manajemen terhadap CSR Pada Perusahaan Jasa Transportasi Tahun 2015-2017 ?
- e. Bagaimana profitabilitas, *leverage*, *earning per share*, kepemilikan manajemen secara simultan berpengaruh terhadap CSR Pada Perusahaan Jasa Transportasi Tahun 2015-2017 ?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui adanya pengaruh profitabilitas terhadap CSR Pada Perusahaan Jasa Transportasi Tahun 2015-2017.
- b. Untuk mengetahui adanya pengaruh *leverage* terhadap CSR Pada Perusahaan Jasa Transportasi Tahun 2015-2017.
- c. Untuk mengetahui adanya pengaruh *earning per share* terhadap CSR Pada Perusahaan Jasa Transportasi Tahun 2015-2017.

- d. Untuk mengetahui adanya pengaruh kepemilikan manajemen terhadap CSR Pada Perusahaan Jasa Transportasi Tahun 2015-2017.
- e. Untuk mengetahui adanya pengaruh secara simultan profitabilitas, *leverage*, *earning per share*, kepemilikan manajemen terhadap CSR Pada Perusahaan Jasa Transportasi Tahun 2015-2017.

### 1.3.2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengukuran profitabilitas, *leverage*, *earning per share* dan kepemilikan manajemen yang baik serta pengaruhnya terhadap *Corporate Social Responsibility* (CSR).

- b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan menjadikan referensi khususnya di bidang akuntansi yang berkaitan dengan profitabilitas, *leverage*, *earning per share*, kepemilikan manajemen dan CSR oleh kalangan umum khususnya mahasiswa, dosen, dan segenap lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

- c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui sampai sejauh mana pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang telah dilakukan perusahaan. Sehingga pemerintah dapat

mempertimbangkan suatu standar pelaporan CSR yang sesuai dengan kondisi Indonesia.

d. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang laporan keuangan tahunan sehingga dijadikan sebagai acuan untuk pembuatan keputusan investasi.

e. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dalam penerapan CSR dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya melakukan tanggung jawab sosial perusahaan serta diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan kebijakan oleh manajemen perusahaan mengenai tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan yang disajikan.

